

Historisitas Dalam
Pandangan Filosof
Barat dan
Pancasila:

*Refleksi Kritis terhadap Makna
Pembangunan Indonesia*

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia yang disahkan sebagai Dasar Filsafat Negara pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan hal yang fundamental bagi bangsa Indonesia. Semakin hari semakin nyata bahwa tidak ada soal-soal ideologi, kenegaraan, hukum, dan kemasyarakatan di Indonesia yang tidak terjalin dengan Pancasila. Menjelang setengah abad perkembangan negara Republik Indonesia telah ditampilkan berbagai pendapat dan pikiran mengenai Pancasila.

Pendapat-pendapat atau pernyataan-pernyataan mengenai Pancasila telah banyak dikemukakan, baik yang dogmatik maupun yang skeptik, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu juga telah dikeluarkan berbagai ketetapan formal yang bersifat konstitusional yang berkenaan dengan Pancasila. Namun demikian sampai saat ini jarang dijumpai suatu produk ilmiah mengenai makna historisitas dalam filsafat Pancasila.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah hidup manusia sepintas kilas kelihatannya tanpa makna, hal ini terjadi apabila tempat dan tujuan sejarah disamakan dengan proses sejarah yang menuju kemusnahan dan kehancuran total, menuju ke sebuah lubang besar dan gelap, sehingga menimbulkan pertanyaan apa makna dari proses yang akhirnya menuju kepada kemusnahan? Menjawab pertanyaan ini Kant dan Popper menegaskan bahwa manusia harus memberikan atau menerapkan suatu makna kepada sejarah, karena hanya dengan demikian perbuatan manusia dapat disusun secara kait-mengkait dan dapat di arahkan ke hari depan. Manusia mempunyai kewajiban etis untuk menggambarkan hari depan, sehingga sejarah mempunyai makna. Makna sejarah terletak pada kemampuan manusia secara bebas dan dengan kesadaran penuh mengenai tanggung jawab etis dalam memilih, bagaimana wajah hari depan itu, dan bagaimana manusia secara optimal dapat memberi makna dan isi kepada sejarah itu (Ankersmit, 1987:372).

Sartono Kartodirdjo (1990:204-205), mengatakan bahwa sejarah itu mempunyai fungsionalitas, artinya sejarah tidak hanya mempunyai makna dokumenter, akan tetapi juga mengandung makna ekspresif, yaitu mewujudkan kesadaran kolektif. Pengalaman sebagai pengendapan hasil proses kebudayaan berupa suatu subjektifitas hasil internalisasi

subjek, sedangkan yang berupa objektifitas merupakan hasil eksternalisasi. Objektifikasi terus-menerus akan menghasilkan pengalaman kolektif. Kebersamaan dalam pengalaman kolektif dengan sesama warga komunitas, kebersamaan pengalaman dengan generasi-generasi terdahulu yang bersifat vertikal yang menjamin adanya kontinuitas atau tradisi. Objektifikasi pengalaman kolektif vertikal ini dapat berbentuk lambang-lambang, penulisan sejarah adalah salah satu dari lambang-lambang itu. Di dalam lambang itu terjadi pemersatuan kesadaran kolektif mengenai masa lampau golongannya.

Kebersamaan manusia dalam pengalaman kolektif menampakkan wujudnya dalam bentuk kebudayaan. Setiap kebudayaan ber-langsung dalam waktu, selalu dalam perubahan, dan hidup kebudayaan tunduk pada suatu gerakan, dalam gerakan itu yang lama lenyap untuk digantikan dengan yang baru. Di situ senantiasa terjadi pembentukan, penciptaan kembali, dan pembaharuan. Karena setiap kebudayaan selalu mempunyai gambaran angan-angan tertentu mengenai masa silamnya, maka kebudayaan senantiasa menghasilkan bentuk gambaran sejarahnya sendiri (Sartono Kartodirdjo, 1986:5). Kebudayaan yang tertentu menghasilkan sejarah yang tertentu pula. Sejarah yang timbul dari dorongan dan kebutuhan, tak hanya sekedar hanya ingin tahu masa lampau, akan tetapi juga ingin mengerti maknanya. Pertanyaan tentang makna sejarah merupakan pertanyaan yang hidup, dan terus-menerus ditanyakan oleh manusia, yaitu pertanyaan tentang dari manakah dan akan ke manakah hidup ini, dari mana asalnya dan ke mana tujuannya. Tiap kebudayaan mempunyai jawabannya sendiri-sendiri yang tergantung dari sifat-sifat perangnya.

Soedjatmoko (1983:63-64) menegaskan bahwa kalau manusia hanya mengatakan bahwa semua yang ada di masyarakat berakar pada masa lampau. Manusia harus mengatakan bahwa kenyataan hari kini itu hanya dapat diartikan kalau ia mampu menangkap arti keaktifan yang menjelma dalam kenyataan sosial, dan manusia hanya dapat menangkap arti itu jikalau manusia juga melihat sekaligus pandangan dan harapan mengenai hari depan yang menggerakkan keaktifan itu.

Makna historisitas yang menekankan hubungan berkesinambungan antara masa lampau, sekarang, dan masa

depan, mengandaikan adanya perkembangan. Koento Wibisono (1983:109), mengatakan bahwa pengertian perkembangan menyangkut masalah manusiawi yang fundamental-filsafati. Perkembangan itu menyangkut pengetahuan manusia, tidak hanya jiwanya, melainkan manusia dengan seluruh aspek kehidupannya dengan seluruh dimensi sosialnya, manusia yang berada di tempat bersilangnya seluruh kompleks ini, yang tidak terlepas dari masa lampau dan kemungkinan masa depannya.

Bangsa Indonesia dalam memberi isi dan arti terhadap pengertian perkembangan seharusnya bertitik tolak dari filsafat pembangunan yang telah dimilikinya. Filsafat pembangunan itu seperti dicantumkan dalam sertiap GBHN, yaitu bahwa hakikat pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan masyarakat Indonesia seluruh atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, selain menjadi asas juga menjadi tujuan pembangunan itu sendiri. Tolok ukur keberhasilan pembanguan itu adalah nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, yaitu nilai-nilai Pancasila (Koento Wibisono, 1983:109). Singkatnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan (Sastrapratedja, 1991:143).

Penjabaran Pancasila dalam kehidupan harus didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Penjabaran itu menurut Notonagoro harus mencerminkan nilai-nilai kerohanian yang meliputi: (1) nilai kebenaran yang bersumber pada unsur akal manusia (cipta); (2) nilai kebaikan yang bersumber pada unsur kehendak manusia (karsa); (3) nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa manusia; (4) nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan yang bersumber pada kepercayaan (Noor Bakry, 1982:133). Keempat nilai itu harus menjadi landasan bagi historisitas-perkembangan manusia Indonesia. Keempat nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dijadikan pangkal tolak dalam memahami dan memecahkan masalah kehidupan manusia Indonesia yang dihadapkan pada berbagai tantangan sejarah (Pranarka, 1985:386). Tantangan sejarah yang paling besar ialah cara bagaimana manusia membangun masa depannya tanpa harus kehilangan kepribadian dan identitas dirinya.

Pengertian Historisitas

Historisitas (*historicity*) merupakan kata Inggris *history* yang berarti sejarah, kata ini berasal dari kata benda Yunani *istoria* yang berarti ilmu. Menurut definisi yang umum kata *history* berarti masa lampau umat manusia (Gott Schalk, 1957:27). Murtadha Muthahhari (1992:65-67) mengatakan bahwa sejarah dapat didefinisikan dalam tiga cara yang sesungguhnya juga merupakan tiga disiplin kesejarahan yang saling berhubungan erat. (1) Sejarah adalah pengetahuan tentang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, dan keadaan-keadaan kemanusiaan di masa lampau dalam kaitannya dengan masa kini. (2) Sejarah merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang tampak menguasai kehidupan masa lampau, yang diperoleh melalui penyelidikan dan analisis atas peristiwa-peristiwa masa lampau. (3) Filsafat kesejarahan didasarkan pada pengetahuan tentang perubahan bertahap yang membawa masyarakat dari satu tahap ke tahap lain. Filsafat kesejarahan membahas hukum yang menguasai perubahan-perubahan itu. Dengan kata lain, sejarah dalam artian ini adalah ilmu tentang "menjadi" masyarakat, bukan tentang "maujudnya" saja.

Berdasarkan definisi Muthahhari di atas, sejarah dalam artian yang pertama merupakan realitas peristiwa-peristiwa masa lampau yang diungkapkan kembali berdasarkan perspektif sekarang. Sejarah dalam artian yang kedua berkaitan dengan metodologi penulisan sejarah dalam ilmu sejarah berbagai titik puncak penelitian sejarah, dan disebut dengan nama historiografi (Poespoprodjo, 1987:1). Sejarah dalam artian yang ketiga sangat berkaitan erat dengan pandangan manusia tentang gerak sejarah itu sendiri dan peranan manusia dalamnya, pengertian ini disebut juga dengan nama historisitas (kesejarahan). Dalam hal ini hanya manusia yang ditandai historisitas dan merupakan satu-satunya makhluk yang sanggup menghasilkan sesuatu yang baru. Oleh karena itu historisitas berkaitan erat dengan kreativitas dan inventivitas manusia (Bertens, 1987:185-186).

Pandangan bahwa manusia memainkan peranan dalam sejarah, melahirkan berbagai aliran dan pandangan tentang historisitas. Salah satu aliran itu ialah hiostorisisme. Historisisme adalah aliran yang beranggapan bahwa dengan bantuan ilmu-ilmu sosial manusia dapat meramalkan

perkembangan sejarah dengan cara menemukan "ritme" atau "pola", "hukum" atau "trend" yang menentukan jalannya sejarah (Popper, 1985:3). Historisisme merupakan filsafat sejarah yang bereaksi terhadap filsafat sejarah spekulatif yang memepertanyakan hukum-hukum pokok mana yang mengatur perkembangan dan perubahan dalam sejarah (Gardiner, 1985:123). Filsafat sejarah spekulatif mencari struktur dalam yang terkandung dalam proses sejarah dalam keseluruhannya. Filsafat sejarah spekulatif merupakan perenungan filsafati mengenai tabiat atau sifat-sifat proses sejarah. Biasanya ada tiga macam pertanyaan yang perlu dijawab. (1) Irama atau pola macam apa yang dapat diamati dalam proses sejarah ? (2) Manakah "motor" yang menggerakkan proses sejarah / (3) Apa sasaran akhir yang dituju oleh proses sejarah ? (Ankersmit, 1987:17).

Filsafat sejarah spekulatif secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu yang terbuka dan tertutup. Filsafat sejarah spekulatif terbuka pada umumnya dianut oleh para filosof eksistensialisme. Mereka memandang perkembangan sejarah sebagai suatu kemungkinan yang selalu dalam proses menjadi yang tidak pernah berhenti. Sedangkan filsafat sejarah spekulatif tertutup memandang perkembangan masyarakat sebagai suatu gerak linear dan tertutup, linear artinya jika suatu tahapan dalam sejarah tercapai maka tahap sebelumnya dianggap telah lewat. Tertutup artinya puncak perkembangan itu sudah ditentukan, jika puncak perkembangan telah tercapai maka masyarakat tidak lagi akan berkembang (Koento Wibisono, 1983:18). Pandangan sejarah seperti ini tampak pada Hegel, Marx, dan Comte. Pandangan filosof-filosof ini tentang historisitas akan dibahas lebih lanjut dalam bagian berikutnya.

Historitas dalam Pandangan Beberapa Filosof Barat

A. George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831).

Istilah filsafat sejarah berasal dari Voltaire yang menggunakan istilah ini untuk pertama kali dalam jaman modern sebagai perbedaan dengan interpretasi teologis tentang sejarah (Lowith, 1970:1). Namun demikian, baru sejak dan setelah Hegel filsafat sejarah mendapat tempat yang penting dalam sejarah filsafat (Harun Hadiwijono, 1980:105).

Filsafat sejarah diciptakan Hegel sejajar dengan apa yang dinamakan filsafat sejarah yang formal dan material (Ankersmit, 1987:34). Dalam filsafat sejarah yang formal Hegel mengembangkan struktur abstrak apriori yang mendasari teorinya mengenai proses sejarah seluruhnya. Dalam filsafat sejarahnya yang material melalui suatu deskripsi aposteriori mengenai proses sejarah, ia memberi isi konkret kepada struktur abstrak itu.

Filsafat sejarah Hegel yang formal bertitik tolak dari pengertian, yang pokok itu roh. Dengan roh manusia mampu mengkombinasikan gagasan-gagasan, lalu memperoleh pengetahuan dengan cara apriori yang tidak berdasarkan pengalaman (Ankersmit, 1987:24). Roh manusia itu aktif dalam dua bidang. Pertama sebagai Roh Subjektif (*Geist an sich*) ialah sebagai subjek yang mengetahui, manusia mampu mengetahui dirinya dan dengan mempergunakan akal budinya dapat mencari jalan di tengah-tengah kenyataan. Dengan berpikir secara rasional manusia dapat melacak kaidah-kaidah yang menopang kenyataan. Kedua Roh Objektif (*Geist fur sich*) yang menguasai hal-hal yang objektif. Kenyataan itu tidak kacau balau, melainkan memperlihatkan tata tertib dan keteraturan yang menaati kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip rasional.

Proses perkembangan sejarah berlangsung secara dialektik dan seluruh kenyataan itu suatu proses dialektik. Dalam proses ini semua pertentangan dari pikiran dan kenyataan diatasi dan diangkat, atau didamaikan dalam sintesis-sintesis yang merupakan titik pangkal baru untuk sintesis-sintesis pada tingkat yang lebih tinggi (Harry Hammersma, 1983:42). Dialektika sintesis yang lebih tinggi berlangsung antara Roh subjektif sebagai tese dengan Roh Objektif sebagai antitese. Kedua hal ini lalu tindih menindih, saling mencerminkan, saling berjumpa dalam sintesa tertinggi yang disebut Roh Mutlak (*Geist an und fur sich*). Bila tahap Roh Mutlak sudah tercapai maka sejarah pun tamat (Ankersmit, 1987:25). Dengan demikian pada Hegel sejarah merupakan suatu gerak menuju ke sebuah tujuan, bersifat teleologis. Tujuan sejarah ialah menghapus keretakan antara Roh Subjektif yang menyelami kenyataan dengan Roh Objektif yang menopang kenyataan.

Filsafat sejarah material ala Hegel diturunkan dari filsafat sejarah formalnya. Ia membagi proses sejarah menjadi tiga bagian, yakni sejarah Timur, Yunani-Romawi, dan Jerman. Pembagian ini didasarkan atas trias Hegel, yakni Roh Subjektif, Roh Objektif, dan Roh Mutlak. Dunia Timur diibaratkannya dengan Roh Subjektif ketika Roh belum sadar akan dirinya, manusia masih berada dalam keadaan alamiah. Dunia Yunani-Romawi seperti Roh Objektif yang menempatkan diri di luar berhadapan dengan Roh Subjektif. Keduanya kemudian disintesakan dengan munculnya Roh Mutlak di dalam dunia Jerman. Dalam keadaan ini terjadi peruknan antara yang subjektif dan yang objektif.

B. Karl Marx (1818-1883)

Filsafat sejarah spekulatif Marx bertitik tolak dari dialektika Hegel. Namun demikian Marx menolak anggapan Hegel bahwa yang berproses itu adalah Roh. Menurut Marx yang berdialektika itu adalah materi dan sebagai "motor" penggerakannya ialah pertentangan kelas dan ekonomi sebagai penentunya. Filsafat sejarah spekulatif ala Marx dibedakan dalam tiga tahap, yakni tahap primitif, tahap Antik, tahap Abad Pertengahan dan dunia borjuis kapitalis. Tahap Abad Pertengahan dan dunia borjuis kapitalis yang oleh Marx disebut sebagai dunia modern merupakan pokok kajiannya.

Dunia modern menurut Marx dapat dipahami dalam triade besar, yaitu feodalisme sebagai tesis, kapitalisme sebagai sintesis, dan komunisme sebagai sintesis (Beck, 1967:279). Feodalisme ditandai oleh ekonomi agraris, pemilik tanah merupakan penguasa yang menindas para pekerja di ladang pertanian. Dalam masa feodalisme ini pertentangan terjadi antara kaum bangsawan pemilik tanah dengan petani-buru. Kapitalisme ditandai oleh majunya industrialisasi, pemilik modal merupakan penguasa yang menghisap kaum buruh. Dalam masa ini pertentangan terjadi antara kaum kapitalisme dengan kaum proletar. Karena Marx hidup pada masa ini maka ajaran ditekankan untuk membebaskan kaum buruh dari cengkaman kaum kapitalis. Komunisme adalah era hilancau balau, melainkan memperlihatkan tata tertib dan keteraturan yang menaati kaidah-kaidah atgnya pertentangan kelas, dalam masa ini tidak ada lagi perbedaan antara tuan dan budak, atau antara majikan dan buruh.

C. Auguste Comte (1798-1857)

Filsafat sejarah Auguste Comte bertitik tolak dari ajarannya tentang hukum tiga tahap. Menurut Comte sejarah umat manusia, juga jiwa manusia, baik secara individual maupun secara keseluruhan, bergerak menurut hukum tiga tahap itu, yaitu tahap positif atau riel (Koento Wibisono, 1983 : 11). Perkembangan dalam setiap tahap merupakan perkembangan yang bergerak secara linear dan tertutup. Artinya, jika tahap baru muncul maka tahap abstrak muncul, maka tahap teologi sudah tidak ada lagi, dan perkembangan akan berhenti manakala tahap positif telah terwujud.

Tahap teologi atau fiktif merupakan tahap awal perkembangan jiwa atau masyarakat. Dalam tahap ini manusia selalu berusaha mencari dan menemukan sebab pertama dan tujuan akhir segala sesuatu yang ada (Koento Wibisono, 1983:11). Tahap teologis dibedakan lagi menjadi tiga tahap, yaitu animisme, politeisme, dan monoteisme (Hammersma, 1983:55). Dalam ani-mistik orang beranggapan bahwa benda-benda merupakan sesuatu yang berjiwa, sehingga benda-benda dikeramatkan, dianggap suci atau sakti. Pada tahap berikutnya, yaitu politeisme, gejala-gejala keramat atau suci ini disebut dewa-dewa, dan dewa-dewa mengatur alam semesta sesuai dengan spesialisasinya. Pemikiran manusia tentang dewa-dewa ini berkembang terus sehingga mereka akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa mesti ada dewa utama sebagai pemimpin. Konsep ini kemudian melahirkan pandangan bahwa Dewa atau Tuhan itu hanya satu, dan dari sinilah berkembangnya monoteisme.

Tahap metafisis muncul seiring dengan perubahan cara-cara berpikir manusia dalam usahanya mencari dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gejala-gejala alam. Manusia dalam tahap ini melepaskan diri dari kekuatan adikodrati dan beralih pada kemampuan akal pikirnya dan kekuatan abstraksinya. Dalam perkembangan berikut akal budi ini memainkan peranan utama dan merupakan satu-satunya kekuatan yang dipergunakan oleh manusia untuk menerangkan adanya segala sesuatu (Koento Wibisono, 1983:14).

Tahap positif merupakan tahap puncak dalam perkembangan sejarah kemanusiaan. Pada tahap ini

perkembangan jiwa manusia telah melewati pengetahuan yang sifatnya abstrak dan beralih ke pengetahuan yang pasti, jelas, dan bermanfaat (Koento Wibisono, 1983:15). Kalau manusia mengerti bahwa tidak ada gunanya untuk mencari pengetahuan mutlak baik teologis maupun metafisis, dan tidak lagi mencari asal dan tujuan segala sesuatu, hakekat benda-benda, maka manusia telah memasuki tahap positif. Dalam tahap ini manusia mulai menemukan hukum-hukum alam hanya mengamati dan melulu dengan menggunakan akal budinya.

D. Nicolai Alexandrovitch Berdyaev

Filosof kelahiran Rusia ini merupakan penganut eksistensialisme yang religius. Menurut Berdyaev manusia adlah pembuat sejarah, dan dalam prakarsanya membuat sejarah itu ia mewujudkannya kebebasannya (Fuad Hassan, 1976:65). Oleh karena itu manusia bukan bagian dari sejarah, akan tetapi justru sejarahlah yang merupakan bagian dari manusia, sehingga manusia seharusnya tidak menerima kesejarahannya sebagai budak yang penurut, melainkan sebagai manusia bebas yang menentukan sejarahnya (Nuncho, 1966:65).

Kesejarahan manusia itu mengandung dua unsur, yaitu unsur destruktif dan unsur kreatif. Unsur destruktif mengikat manusia pada sesuatu yang telah lampau, dan terhadap masa lampau itu manusia tidak berdaya, dalam arti manusia tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi pada masa lampau itu. Unsur kreatif merupakan unsur pembuka kesempatan bagi manusia untuk mewujudkan cita-citanya. Dengan unsur kreatif ini manusia berusaha melengkapi kekurangan-kekurangan masa lampaunya (Berdyaev, 1949:39). Unsur destruktif tidak dipahami sebagai sesuatu yang menghancurkan, akan tetapi lebih bersifat sesuatu yang telah lampau. Namun demikian unsur destruktif sungguh akan bermakna kehancuran apabila manusia menatap masa lampau sebagai suatu moment atau peristiwa yang telah mati dan tidak memiliki makna sama sekali. Oleh karena itu masa lampau haruslah dikaji dan diteliti agar mempunyai makna bagi masa depan manusia itu sendiri.

Masa lampau merupakan titik awal lahirnya pandangan tentang filsafat sejarah. Melalui penelitian dan

pengkajian terhadap masa lampau muncullah teori-teori mengenai sejarah, yang akhirnya akan melahirkan gagasan-gagasan besar dalam filsafat sejarah (Berdyaeu, 1959:199). Berdyaeu membedakan pengertian sejarah (ilmu sejarah) dengan filsafat sejarah. Ilmu sejarah adalah ilmu pengetahuan tentang masa lampau, sedangkan filsafat sejarah tidak hanya mengenai masa lampau, namun juga membicarakan masa depan. Menurutny masa lampau itu penting, akan tetapi masa lampau tidak akan bermakna tanpa dikaitkan dengan perspektif masa depan. Singkatnya sejarah hanya bermakna apabila diletakkan dalam kerangka masa depan.

Kesinambungan antara masa lampau dengan masa depan mengisaratkan suatu perkembangan, yang di dalam filsafat Berdyaeu bermakna kemajuan (progress). Ia berpendapat pokok pikiran tentang kemajuan merupakan hal fundamental bagi metafisika sejarah. Ide kemajuan diterima sebagai tujuan sejarah, dan kemajuan itu tunduk pada prinsip teleologis. Hubungan sejarah dengan kemajuan dapat dirumuskan bahwa kemajuan itu merupakan pusat dari gerakan sejarah. Kemajuan dibedakan dengan evolusi. Perkembangan dalam evolusi hanya terbatas pada hal-hal alamiah, sedangkan perkembangan dalam progress lebih bersifat spiritualistik. Evolusi lebih banyak diartikan sebagai proses biologis yang tidak mengandung kreatifitas, sedangkan kemajuan mutlak membutuhkan kreatifitas (Berdyaeu, 1954:164).

Manusia bukan makhluk yang statis melainkan dinamis, dalam artian ia mencipta dan mengembangkan masa depannya sendiri. Bertitik tolak dari kebebasan yang dimilikinya dan unsur kreatif yang ada padanya, bahkan manusia merencanakan dan merekayasa masa depannya, bahkan manusia dapat menetapkan bentuk masa depan sesuai dengan kecenderungan (trend) pada waktu. Manusia dengan segala kebebasannya dapat membuat sesuatu yang baru di masa depan, namun tidak ada kepastian tentang corak masa depan itu. Corak masa depan sangat ditentukan oleh upaya manusia mengelola alam lingkungannya secara seimbang dan kemampuannya menyeimbangkan kedudukannya sebagai makhluk spiritual dan makhluk alamiah.

E. Martin Heidegger (1889-1976)

Dasar pokok dari filsafat Heidegger ditegaskannya dalam pengantar *Sein und Zeit*. Ia mengatakan maksud ditulisnya buku itu tidak lain untuk merumuskan dengan cara baru mengajukan pertanyaan akan makna "Ada" (Bertens, 1981:149). Pertanyaan itu sendiri adalah pertanyaan kuno, pertanyaan klasik, yang telah diajukan sejak permulaan filsafat Barat. Pertanyaan klasik itu diajukan kembali oleh Heidegger dengan bantuan Fenomenologi. Penggunaan fenomenologi sebagai metode dalam mencari makna Ada, membawa Heidegger kepada suatu keyakinan, bahwa langkah awal menuju ke situ, yakni kepada suatu jawaban atas pertanyaan akan makna Ada dengan meneliti atau menyelidiki sipenanya itu sendiri, yaitu manusia. Manusia dapat mengajukan pertanyaan itu karena ia mempunyai pengertian-akan-Ada (Bertens, 1981:152).

Heidegger dalam *Sein und Zeit* mengadakan analisa terhadap *Dasein* (sebutan untuk manusia), artinya ia berusaha memperlihatkan struktur-struktur dasarnya *Dasein*. *Dasein* sebagai objek dari seluruh analisis untuk mencari makna Ada merupakan pusat transendensi yang sanggup mengatasi dan melampaui "Seinde" (ada) dalam menuju proses-Ada (Bertens, 1981:156). Dalam pertanyaan ini terkandung tiga unsur dasarnya *Dasein*. (1) *Dasein* berarti suatu "proyek" (*Entwurf*). Seluruh segi dan daya yang ada di dalam *Dasein* dikonstitusikan dan diproyeksikan keluar. (2) *Dasein* adalah subjek, artinya *Dasein* merupakan suatu "diri" yang mendahului dikhotomi subjek dan objek dalam keterbatsannya. (3) *Dasein* adalah pusat manusia, dengan kemampuan mentransendensi manusia adalah sumber yang membangun seluruh kehidupan manusiawi, seperti moral, teoritisasi, sensasi. Semua kemampuan inilah yang menjadi karakterisasi dirinya sebagai manusia.

Makna ontologis *dasein* hanya dapat dimengerti dalam temporalitasnya. Temporalitas oleh Heidegger dimengerti sebagai makna keprihatinan (*Sorge*) yang memungkinkan proses ada dari *Dasein*. Secara khusus dapat dikatakan bahwa temporalitas merupakan kerangka referensi atau horison bagi proyek *Dasein*, dan sebagai konotasi dari tujuan akhir (*woraufin*) yang memungkinkan terselenggaranya proyek

tersebut mencakup dimensi lampau, sekarang, dan akan datang.

Dari ketiga aspek temporalitas, Heidegger lebih memprioritaskan pada dimensi yang akan datang, atau diartikannya dengan 'yang akan datang ke arah kita'. Masa depan (yang akan datang) menjadi penggerak sekarang dan masa lampau manusia. Salah paham tentang temporalitas dalam hubungannya dengan yang akan datang ialah diartikannya temporalitas sebagai sesuatu hal-dalam-ada (thing-ini-being) sebagai sesuatu yang hendak dicapai atau diraih. Temporalitas itu adalah suatu "ekatasis" (yang berdiri di samping dirinya). Ekatasis adalah menyatunya masa lampau, sekarang, dan yang akan datang dalam Dasein. Manusia adalah makhluk temporal, dan oleh sebab itu ia adalah juga makhluk historis. Maka analisis terhadap historisitas sesungguhnya merupakan eksplisitasi dan elaborasi lebih lanjut dari studi temporalitas.

Historisitas adalah khas manusia, dalam arti historisitas hanya dapat diaplikasikan kepada manusia dan hanya dimengerti oleh manusia. Eksistensi tidak berada sebagai kumpulan momen-momen, atau kumpulan kejadian yang cerai-berai, seakan-akan sejarah berupa arus yang di dalamnya dasein terombang-ambing dipermukaannya. Eksistensi merupakan suatu aktivitas untuk mengembangkan diri dan menuju kepada Dasein yang masih harus diraih. Heidegger mempunyai preferensi atas temporalitas, dalam historisitas, Heidegger menempatkan masa depan perspektif yang dominan.

Dari pendapat para filosof yang telah dikemukakan, secara garis besar pandangan tentang historisitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu historisitas tertutup dan historisitas yang terbuka. penekanan terhadap perkembangan aspek historisitas juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu tekanan pada perkembangan roh (spiritualitas) dan tekanan pada aspek lahiriah (materialitas).

Historisitas dalam Filsafat Pancasila

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan dasar Negara, dalam pengamalannya tidak hanya sebagai sumber dari segala sumber hukum, tetapi juga menjadi landasan bagi setiap aspek kehidupan manusia Indonesia, antar lain sebagai landasan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional

merupakan upaya bangsa Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik. Melalui persiapan dan perencanaan yang seksama diharapkan akan terwujud suatu masyarakat yang dicita-citakan, yaitu masyarakat Pancasila. Agar cita-cita luhur tersebut dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana makna perkembangan menurut nilai-nilai Pancasila, sebab kesalahan interpretasi akan mengakibatkan kekeliruan dalam pengalamannya.

Pada bagian terdahulu telah dibicarakan berbagai pandangan historisitas. Dari berbagai pandangan itu, pandangan yang akan dipakai sebagai paradigma dalam memahami historisitas Pancasila adalah pandangan sejarah menurut Berdyaev. Pilihan terhadap filosof ini didasarkan atas kedekatannya dengan nilai-nilai Pancasila dalam memandang manusia, meskipun terdapat beberapa perbedaan, seperti manusia yang selalu berada dalam situasi paradoksal.

Kees Bertens (1987:193-198) mengemukakan sekurang-kurangnya ada empat aspek yang mesti terdapat dalam historisitas. Pertama, historisitas manusia hanya dapat berlangsung dalam perkembangan yang harmonis antara unsur spiritualitas dan materialitas. Kedua, historisitas dapat berlanjut jika manusia bebas dalam merealisasikan diri. Ketiga, historisitas selalu berkaitan dengan waktu atau temporalitas yang selalu kontinu. Keempat, historisitas yang hanya dapat terjadi jika manusia berkarya bersama dengan manusia lain.

A. Manusia dan Sejarah

Manusia membentuk serta menghasilkan sejarah dan bersamaan dengan itu ia dibentuk dan dipengaruhi oleh sejarah (Bertens, 1987:200). Oleh karena itu pada hakikatnya semua permasalahan berkisar sekitar faktor manusiawi, tidak hanya sebagai unsur objektif, lebih dari itu juga selaku unsur subjektif (Sartono, 1990:252). Dengan demikian manusia merupakan faktor utama dalam pembahasan historisitas. Sebab perbedaan visi yang berbeda tentang manusia akan mengakibatkan pandangan yang berbeda pula terhadap makna historisitas. Pada bagian berikut akan dikemukakan konsep manusia menurut perspektif Pancasila berdasarkan pandangan Notonagoro.

Notonagoro (1980:23) mengidentifikasi manusia sebagai makhluk monopluralis yang terdiri atas susunan kodrat, sifat kodrat dan kedudukan kodrat. Manusia menurut susunan kodratnya adalah makhluk jasmani dan rohani, menurut sifat kodratnya sebagai makhluk sosial dan individu, dan menurut sifat kodratnya sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sekaligus sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Konsep Notonagoro tentang manusia lebih utuh dibandingkan dengan berbagai konsep filosof Barat. Bertolak dari konsep manusia ini akan ditelusuri pandangan Pancasila tentang sejarah.

Manusia menghayati historisitas atau kesejarahannya dalam kedudukannya sebagai makhluk monopluralis. Manusia dalam historisitasnya tidak hanya mementingkan perkembangan aspek materialitasnya, akan selalu diimbangi dengan perkembangan spiritualitasnya. Pembangunan manusia selalu berdasarkan atas aspek lahiriah dan aspek batiniah. Sejarah tidak pernah dibuat oleh manusia sendirian, akan tetapi selalu dalam kebersamaan kelompok. Kemerdekaan yang dinikmati oleh bangsa Indonesia sekarang merupakan hasil perjuangan manusia Indonesia secara bersama-sama. Di dalam proses perjuangan itu peranan individu tetap diakui, seperti diakuinya beberapa orang sebagai pahlawan kemerdekaan. Historisitas bangsa Indonesia digerakkan oleh manusianya, namun demikian sebagai bangsa yang religius, manusia Indonesia mengakui bahwa berhasilnya usaha dan upaya manusia tidak terlepas dari peranan Tuhan. Pernyataan ini tersurat dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan itu merupakan karunia dan Rahmat Allah.

B. Sejarah dan Temporalitas

Historisitas mengandaikan bahwa eksistensi manusia dijalankan dalam waktu, atau dengan kata lain eksistensi manusia menurut kodratnya mempunyai suatu struktur temporal. Sejarah perkembangan manusia selalu terkait dengan tiga dimensi kesejarahan, yaitu dimensi lampau, dimensi sekarang, dan dimensi yang akan datang. Dari ketiga dimensi ini hanya sekarang (kini) yang real, artinya masa lampau terangkum dalam sekarang, dan masa depan menjadi proyeksi dari masa kini.

Temporalitas dalam historisitas Pancasila secara jelas tergambar dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila jika ditempatkan dalam keseluruhan konteks Pembukaan UUD 1945 menunjukkan adanya interpretasi terhadap sejarah bangsa Indonesia di masa lalu serta bagaimana sejarah harus dibentuk di masa depan (Sastrapratedja, 1991:142). Masa lampau Indonesia tergambar dalam alinea pertama dan alinea kedua. Kedua alinea itu menggambarkan keadaan Indonesia yang terjajah dan sedangkan melaksanakan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Masa sekarang tergambar dalam alinea ketiga, yaitu berupa pernyataan kemerdekaan. Kemerdekaan sebagai 'kekinian' berlangsung secara terus menerus saat demi saat. Masa depan bangsa Indonesia itu terumus dalam alinea keempat berupa prinsip-prinsip pokok yang akan dilakukan oleh bangsa Indonesia secara terus menerus. Prinsip-prinsip pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam GBHN sebagai landasan operasional bangsa Indonesia merencanakan dan merekayasa masa depannya. Pembangunan Nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasioanl dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju (GBHN, 1993:17).

C. Arah Sejarah

Manusia dalam hidupnya mengejar kebahagiaan spiritual dan kesejahteraan material (R. Sujadi dkk, 1986:22). Artinya perkembangan sejarah menurut filsafat Pancasila bukan hanya yang spiritual (seperti pada Hegel), atau yang material (seperti pada Marx). Sebab bangsa Indonesia yang menganut Pandangan hidup Pancasila tidak mengikuti aliran spiritualisme maupun aliran materialisme yang mempunyai pandangan yang berat sebelah atau ekstrimitas kepada hanya salah satu unsur saja yaitu spirit atau materia dalam kehidupan manusia. Pandangan semacam ini tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya bahwa unsur spirit maupun materi kedua-duanya ada dalam kehidupan manusia baik individual maupun sosial.

Arah perkembangan sejarah bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila ditegaskan dalam setiap GBHN. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan cita-cita

bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dari pernyataan ini terkandung pengertian bahwa masyarakat adil dan makmur yang hendak diwujudkan itu adalah masyarakat yang makmur secara lahiriah dan batiniah dalam kehidupan beragama yang kuat dan penuh kasih sayang. Dengan demikian arah perkembangan tidak hanya mementingkan dimensi horisontal, akan tetapi juga mengutamakan dimensi vertikal. Pembangunan Nasional menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, dan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya (GBHN, 1993:17).

D. Kedudukan Tuhan dalam Historisitas

Bagi bangsa Indonesia kedudukan Tuhan memainkan peranan sentral dalam seluruh aspek kehidupan. Penempatan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama menunjukkan bahwa bangsa Indonesia meyakini pentingnya kedudukan Tuhan dalam hidupnya. Manusia Indonesia dalam menentukan perkembangan hidupnya berdasarkan pada kemampuan dan ikhtiarnya juga disandarkan pada rahmat dan karunia Tuhan. Tuhan bagi bangsa Indonesia selalu hadir dalam setiap kehidupannya, dan menjadi penentu keberhasilan setelah berbagai usaha dilakukan.

Keyakinan bangsa Indonesia pada peranan Tuhan tercermin dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Melalui pernyataan itu manusia Indonesia sadar sepenuhnya bahwa manusia hanya wajib berusaha dan bekerja, akan tetapi segala ketentuan akhirnya diserahkan kepada Tuhan. Hal ini tidak berarti manusia Indonesia pasrah secara pasif terhadap nasib. Pernyataan tersebut merupakan cerminan sikap religiositas manusia Indonesia bahwa alam semesta ini, termasuk manusia adalah ciptaan Tuhan.

Notonagoro (1980:76) menegaskan bahwa bagi bangsa Indonesia Tuhan merupakan "causa prima" segala sesuatu, Tuhan merupakan sebab pertama segala sesuatu, asal mula segala sesuatu. Bagi bangsa Indonesia Tuhan juga menjadi arah atau tujuan segala sesuatu. Dari pernyataan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi bangsa Indonesia, Tuhan sebagai

pencipta tidak sebagai asal segala sesuatu yang disembah atau ditaati segala perintah-Nya, akan tetapi juga menjadi tujuan akhir perjalanan historisitas manusia. Kehidupan manusia tidak hanya terbatas di dunia saja, melainkan akan berlanjut di alam lain yang disebut akhirat. Pada alam akhirat ini manusia mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya sepanjang hidupnya di dunia.

Makna historisitas dalam Pancasila memiliki dimensi eskatologis (ke-akhiratan). Sebab penyelesaian tentang ganjaran bagi perbuatan baik dan buruk tidak dituntaskan di dunia. Banyak manusia yang berbuat jahat dalam hidupnya senang, sedangkan banyak pula orang yang berbuat baik tetapi selalu dalam keadaan susah. Oleh sebab itu sejarah manusia harus berlanjut dalam alam yang lain agar keadilan betul-betul ditegakkan. Hal ini hanya mungkin jika ada dunia akhirat dan Tuhan sebagai hakim tunggal.

Historisitas dan Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI

Pembangunan sekarang telah menjadi bisnis besar, lebih sibuk dengan pertumbuhan dan tuntutan sendiri dengan orang-orang yang seharusnya mereka layani. Karena didominasi oleh para pakar keuangan dan teknokrat yang profesional, industri pembangunan berusaha mempertahankan sikapnya yang apolitik dan bebas nilai dalam menghadapi apa yang justru, lebih dari hal-hal lain, merupakan masalah kekuasaan dan nilai (Korten, 1993:xxvii). Corak pembangunan seperti ini tampaknya juga terjadi di Indonesia. Sejak awal Orde Baru Pembangunan Nasional kita lebih diarahkan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan berbagai prasarana fisik lainnya.

Pembangunan Nasional yang telah berlangsung hampir tiga puluh tahunan dan segera memasuki abad XXI, sedang bergerak antara pelbagai mitos dan realitas, antara cita-cita dan perwujudannya. Perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan memperbaiki mutu kehidupan, kini memunculkan masalah-masalah yang baru. Sebagai bangsa kita dituntut untuk memahami dan terus-menerus menilai keadaan. Dengan kata lain mitos-mitos pembangunan yang cenderung pada pendekatan ekonomis-materialistik perlu ditafsirkan kembali sebagai tanda pemahaman kita yang mendalam atas kenyataan yang terus berubah. Salah satu upaya untuk itu ialah

memahami gerak pembangunan nasional itu dalam lingkup historisitas (kesejarahan) manusia Indonesia.

Historisitas dan Pembangunan adalah dua hal yang dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Historisitas merupakan cara berada khas manusia dalam menghayati hidupnya, sedangkan pembangunan merupakan konsep yang direalisasikan oleh manusia itu sendiri sebagai kegiatan untuk mengarahkan jalan kehidupannya ke arah yang -tentu saja- lebih baik. Historisitas manusia tampak dalam dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakannya, sementara itu pembangunan adalah perwujudan dari historisitas manusia menuju ke arah kehidupan yang lebih baik sesuai dengan keinginan dan cita-citanya. Manusia hidup dalam historisitas, namun tidak berarti bahwa eksistensinya ditentukan dan tergantung sama sekali pada sejarah. Manusia adalah pribadi, dan oleh karena itu historisitas merupakan Panggilan, Aufgabe, manusia harus membangun untuk menentukan sejarah (Soerjanto Poespowardojo, 1993:56). Artinya manusialah yang merencanakan arah masa depan yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya.

Pembangunan nasional tidak boleh dilihat lepas dari alun sejarah bangsa yang berkesinambungan. Dilihat dalam perspektif sejarah, era pembangunan merupakan riak dalam gelombang sejarah yang satu ke gelombang sejarah yang lain atau gelombang sejarah berikutnya. Oleh sebab itu dalam menilai pembangunan harus diperhatikan bagaimana peran manusia dalam gerak langkah pelaksanaan pembangunan itu. Pembangunan menempatkan manusia sebagai subjek pendukung sekaligus sebagai objek yang hendak dibangun. Oleh karena itu Pembangunan Indonesia sudah semestinya pertama-tama memberikan prioritas dalam membangun martabat manusia, yaitu martabat semua warga masyarakat sebagai manusia.

Pembangunan martabat manusia terasa semakin penting dalam menyongsong datangnya pergantian kurun waktu dari abad XX ke abad XXI. Alwi Dahlan (1997:19) mengisaratkan bahwa pergantian kurun waktu senantiasa membawakan harapan dan gagasan baru, apalagi jika menyangkut jangka yang relatif panjang (windu, dasawarsa, 50 tahunan). Tahun 200 bukan saja membawakan abad tetapi juga milenium baru, tidak pernah lagi akan dialami

oleh puluhan generasi mendatang. Oleh karena itu berbagai gagasan yang telah lama dipikirkan, dipendam atau diperam, kini dirasakan mendapat peluang untuk dikembangkan. Semangat pergantian zaman mendorong kesediaan yang lebih terbuka untuk menerima hal-hal baru sehingga menciptakan momentum perubahan di berbagai bidang. Gagasan yang tadinya ditolak, kini lebih mungkin dipertimbangkan.

Semangat pergantian zaman tentu saja akan mempengaruhi nilai-nilai yang ada, dalam hal ini Pancasila. Agar bangsa Indonesia tidak hanyut dalam perubahan global yang tak terelakkan, Ahmad Syafii Maarif (1997:35-36) menegaskan bahwa kita harus sepakat sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan dengan sila pertama sebagai komandannya. Nilai praksis Pancasila harus mampu mengikat dan mencoraki perilaku setiap warga negara Indonesia secara efektif. Karena itu sistem pelaksanaan hukum sebagai penjabaran nilai-nilai Pancasila itu harus jelas dan tegas, hingga rasa keadilan rakyat tidak menjadi bulan-bulanan seperti yang sering berlaku selama ini. Kalau nilai praksis ini tidak menjadi kenyataan, maka tidak ada jaminan bahwa Pancasila pasti selamat di masa depan. Untuk itu dibutuhkan suatu kepekaan sejarah dan kepekaan nurani membaca dinamika kehidupan global dan kehidupan nasional yang berubah dengan cepat pada saat melintasi masa transisi menjelang milenium ke-3 yang cukup kritis. Tujuannya ialah untuk membuat masa depan yang lebih adil, anggun dan ramah.

Terciptanya masa depan yang adil, anggun dan ramah hanya mungkin melalui penataan terhadap arah dan tujuan pembangunan yang sedang dan yang akan dilakukan. Untuk mengantisipasi masa depan yang semakin kompleks, maka penekanan pembangunan melulu pada aspek ekonomi dan perkembangan lahiriah (materi) sudah saatnya dievaluasi. Sebab dari pengalaman bangsa Barat kita dapat mengambil pelajaran bahwa gerak laju sejarah tidak mungkin hanya didasarkan pada aspek lahiriah semata (pembangunan fisik dan ekonomi). Manusia sebagai makhluk mono-pluralis membutuhkan pembangunan yang utuh, yang menyangkut segala bidang kehidupan, lahiriah maupun batiniah, material maupun spiritual.

Pada saat ini memang diakui telah dirasakan manfaat pembangunan yang semakin luas, terutama kesejahteraan lahiriah (ekonomi dan prasarana fisik). Meskipun demikian kemajuan pembangunan dalam bentuk kesejahteraan lahiriah itu nampaknya belum menjamin adanya kesejahteraan batiniah, seperti rasa keadilan, kebebasan dalam berpendapat, kemandirian dalam berdemokrasi, bebas dari rasa ketakutan dan lain sebagainya. Oleh karena itu jika kita menginginkan masa depan kesejarahan (historisitas) bangsa Indonesia mampu bersaing dalam era informasi dan globalisasi pada abad XXI, maka sudah seyogyanya mulai saat ini pembangunan kesejahteraan batiniah menjadi perhatian yang seimbang dengan kesejahteraan lahiriah. Keseimbangan itu tidak hanya dalam slogan-slogan, tetapi lebih dari itu tampak dalam tindakan nyata.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan paparan di muka, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Historisitas berkaitan dengan perkembangan manusia dalam hidupnya. Manusia dalam hidupnya tidak hanya pasif tetapi juga aktif menentukan arah perkembangan sejarahnya.

2. Historisitas menurut Hegel adalah dialektika roh dan puncak pada Roh Mutlak. Marx sebaliknya historisitas adalah dialektika materi dan puncaknya pada masyarakat komunis. Comte melihat historisitas sebagai perkembangan linear yang berakhir pada masyarakat positif. Berdyaev dan Heidegger melihat historisitas dalam keterbukaan ke masa depan yang sangat ditentukan oleh kemampuan manusia dalam bereksistensi.

3. Historisitas dalam filsafat Pancasila berdasarkan atas kesadaran manusia memahami masa lampau dan kemampuannya untuk membuat proyeksi ke masa depan. Perkembangan historisitas tidak hanya ditentukan oleh manusia akan tetapi Tuhan menjadi penentu terakhir arah perkembangan sejarah. Namun demikian usaha dan ikhtiar manusia menjadi faktor utama dalam perkembangan sejarah.

4. Makna historisitas dalam filsafat Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang mencerminkan

kesadaran penuh manusia Indonesia memahami perkembangan bangsanya dan penempatan dirinya diantara perkembangan bangsa-bangsa lainnya.

5. Historisitas dalam Pancasila berdimensi ketuhanan, Tuhan sebagai "causa prima" merupakan asal dan tujuan hidup manusia. Oleh karena itu sejarah tidak berhenti di dunia "kekikinian", akan tetapi dilanjutkan dalam alam akhirat. Dalam alam akhirat ini manusia mempertanggung jawabkan segala perbuatan dihadapan Tuhan.

6. Dibandingkan dengan pandangan historisitas Barat, historisitas dalam filsafat Pancasila mengandung dimensi yang lebih utuh. Manusia yang menyejarah adalah manusia yang merasa dirinya sebagai makhluk Tuhan, yang hidup ditengah-tengah masyarakatnya, dan terdiri dari unsur tubuh dan jiwa. Kesemuanya itu dibangun secara serasi, selaras, dan seimbang.

7. Pembangunan Nasional hendaknya tidak ditekankan pada kesejahteraan lahiriah semata, semestinya kesejahteraan batiniah juga mendapat porsi yang seimbang dalam pelaksanaan. Kesimbangan ini penting mengingat abad XXI yang akan datang dunia semakin penuh dengan tantangan sekaligus peluang. Manusia yang akan mampu bertahan dan bersaing adalah manusia yang kreatif dan inovatif. Manusia kreatif dan inovatif hanya mungkin hadir dalam suasana keterbukaan, yang diperlakukan adil, dan kebebasannya terjamin oleh Negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syafii Maarif, 1997, "Pancasila, Sejarah, Dan Perkisaran Abad Menjelang Milenium Ke-3", dalam *Jurnal Filsafat Pancasila*, No. 1, Th. I, Juli 1997, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.
- Alwi Dahlan, M., 1997, Globalisasi Wawasan, Komunikasi Dan Informasi: Tantangan Akademisi Masa Depan, *Bahan ceramah Penyegaran Dosen Penatar Penataran P-4 Mahasiswa baru UGM tahun 1997*, Yogyakarta, 30 Juli 1997.

- Ankersmit, F.R., 1987, *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-Pendapat Modern Tentang Filsafat Sejarah*, PT Gramedia, Jakarta.
- Beck, Robert N., 1967, *Perspectives in Social Philosophy*, Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York.
- Berdyaev, N., 1949, *The Meaning of History*, translated from the Russian by George Reavey, Geoffrey Bless Ltd., London.
- Berdyaev, N., 1954, *The Destiny of Man*, translated from the Russian by N. Duddington, Geoffrey Bless Ltd. London.
- Berdyaev, N., 1959, *The Beginning and The End*, translated from the Russian by R.M. French, Geoffrey Bless Ltd. London.
- Bertens, K., 1981, *Filsafat Barat Abad XX*, Jilid I, PT Gramedia, Jakarta.
- Bertens, K., 1987, *Panorama Filsafat Barat Modern*, PT Gramedia, Jakarta.
- Fuad Hassan, 1976, *Perkenalan Dengan Eksistensialisme*, Pustaka Jaya Jakarta.
- Gardiner, P., 1984, *The Philosophy of History*, Oxford University Press, Oxford.
- Gottschalk, L., 1975, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hammersma, Harry, 1983, *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern*, Gramedia, Jakarta.
- Harun Hadiwijono, 1980, *Sari Sejarah Filsafat Barat II*, Kanisius, Yogyakarta.
- Koento Wibisono, 1983, *Arti Perkembangan Menurut Positivisme Auguste Comte*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Korten, D.C., 1993, *Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela Dan Agenda Global*, Diterjemahkan: Lilian Tejasudhana, Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Lowith, K., 1970, *Meaning in History*, The University of Chicago Press, Chicago.
- MPR, 1993, *Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mutahhari, M., 1992, *Masyarakat dan Sejarah*, terjemahan M. Hasem, Mizan, Bandung.

- Noor M. Bakry, 1982, *Pancasila Yuridis kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta.
- Notonagoro, 1980, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta.
- Nucho, Fuad, 1966, Berdyaev, S, *Philosophy: The Existential Paradox of Freedom and Necessity*, Doubleday and Company Inc., New York.
- Popper, K., 1985, *Gagalnya Historisisme*, terjemahan Nena Suprpto, LPeES, Jakarta.
- Pranarka, A.M.W., 1985, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta.
- Puspoprodjo, W., 1987, *Subjektivitas dalam Historiografi*, Remadja Karya CV, Bandung.
- Sastrapratedja, M., J. Riberu, dan Frans M. Parera, 1986, *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan: Telaah Etis Dan Kritis*, PT Gramedia, Jakarta.
- Sartono Kartodirdjo, 1986, *Ungkapan-Ungkapan Filsafat Sejarah Barat dan Timur*, Penjelasan Berdasarkan Kesadaran Sejarah, Gramedia, Jakarta.
- Sartono Kartodirdjo, 1990, *Kebudayaan Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sastrapratedja, M., 1991, "Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Budaya", dalam Utoyo Usman dan Alfian (ed), *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta.
- Soedjatmoko, 1983, *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Soerjanto-Poespowardojo, 1993, *Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soejadi, R., Koento Wibisono, 1986, "Aliran-Aliran Filsafat Dan Filsafat Pancasila", dalam: Slamet Sutrisno (ed), *Pancasila Sebagai Metode*, Liberty, Yogyakarta.